



**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH



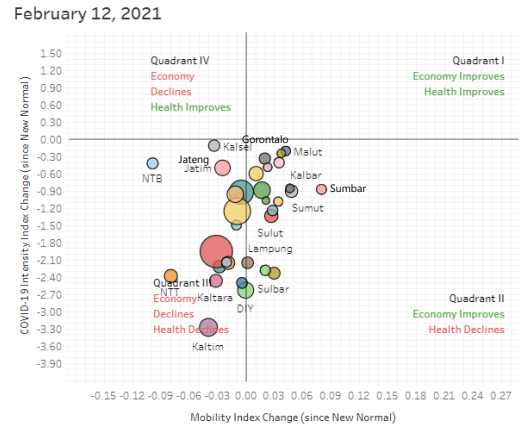
KINERJA KETAHANAN PANGAN

Periode 1 s.d. 12 Februari 2021

Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Subandono • Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo
Adrian Kusuma Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Puspita Anggraeni • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa

KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

Aktivitas Perekonomian Berdasarkan *Mobility Index*



- Aktivitas perekonomian di daerah mengalami sedikit peningkatan dalam jangka waktu 28 Januari 2021 s.d. 12 Februari 2021, yaitu dari -0,110 menjadi -0,103.
- Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel *mobility index* dan COVID-19 *intensity index change*, tidak ada provinsi yang masuk ke dalam kuadran I (keadaan kesehatan dan ekonomi membaik). Provinsi yang posisinya paling dekat dengan kuadran I adalah Maluku Utara dan Gorontalo. Sedangkan provinsi yang berada di bagian bawah kuadran III (kondisi kesehatan dan ekonomi memburuk) adalah Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.

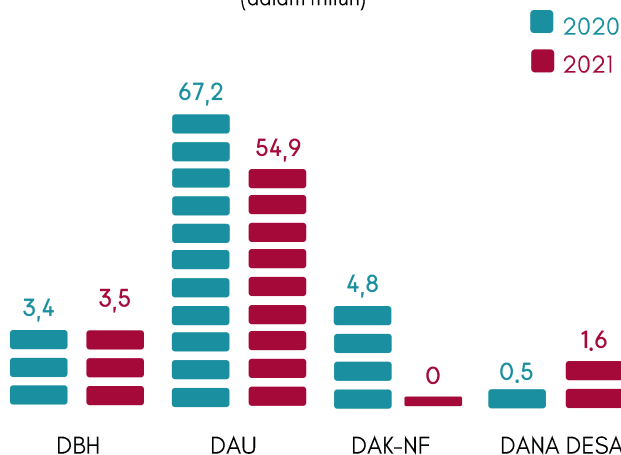
*Data CSIS

2

KINERJA TKDD

Realisasi TKDD 2021

Realisasi s.d. 15 Februari YoY
(dalam triliun)

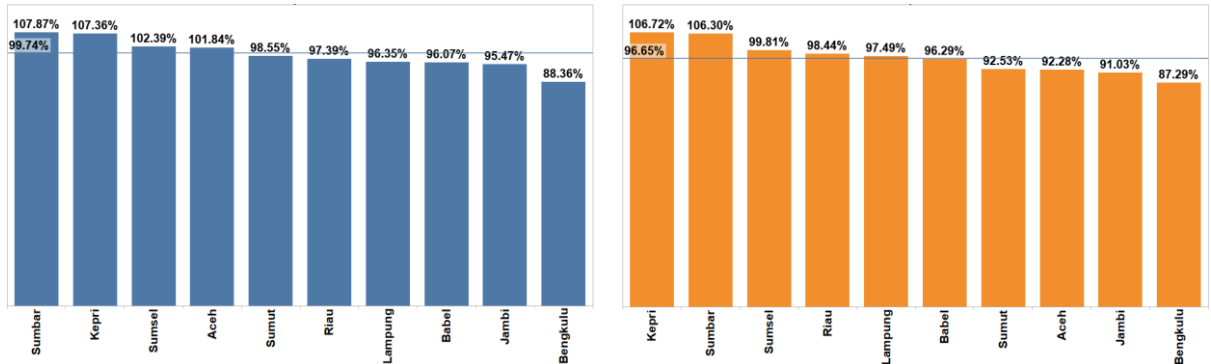


Secara YoY, realisasi TKDD s.d. 15 **Februari 2021** sebesar Rp60,08 T atau mengalami **penurunan 21,0%** dibandingkan realisasi Februari 2020 sebesar Rp76,05 T. **Penurunan terbesar** bersumber dari **DAU sebesar 18,3%** akibat adanya penambahan persyaratan kinerja penyaluran DAU Februari 2021.

Realisasi BLT sebesar Rp101,5 M kepada 5.199 Desa.

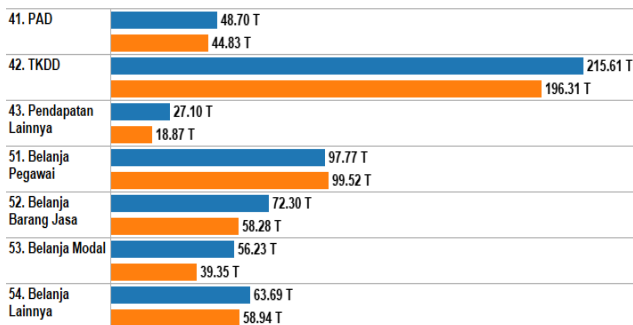
KINERJA FISKAL DAERAH

Kinerja APBD Pulau Sumatera



Provinsi di Pulau Sumatera dengan realisasi pendapatan TA 2020 lebih tinggi dari angka Nasional (99,74%), yaitu **Sumbar, Kepri, Sumsel, dan Aceh**. Sedangkan untuk realisasi belanja agregat, **Kepri, Sumbar, Sumsel, Riau, dan Lampung** memiliki angka realiasi di atas rata-rata Nasional (96,65%).

■ 2019
■ 2020



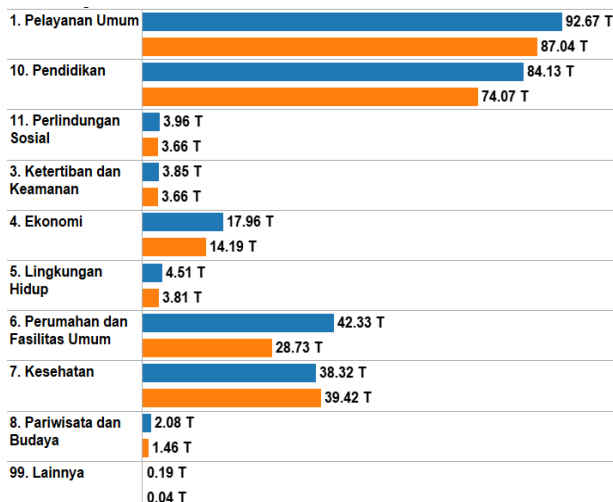
Secara YoY, realisasi **pendapatan** di Sumatera mengalami **penurunan 10,78%**, lebih rendah dari penurunan **Nasional** sebesar **11,84%**. Hal serupa juga terjadi pada realisasi **belanja yang turun** sebesar **11,70%** dan lebih rendah dari penurunan **Nasional** sebesar **12,23%**.

Salah satu sumber **penurunan** pendapatan adalah penurunan **PAD**, sebesar **7,96%**. Hal ini disebabkan, terutama karena adanya **penurunan pajak daerah** yang **berbasis konsumsi**, seperti penurunan **Pajak Hiburan 61,31%**, **Pajak Hotel 51,67%**, **Pajak Restoran 28,88%**, **BBNKB 29,83%**, dan **PBBKB 8,65%**.

Hampir **seluruh komponen belanja** mengalami **penurunan**, kecuali **Belanja Subsidi** naik **7,03%** dan **Belanja Tak Terduga** naik **3085,99%**, sejalan dengan kebijakan realokasi dan *refocusing* dalam rangka penanganan pandemi di 2020.

Untuk **belanja per fungsi**, hampir **semua belanja** mengalami **penurunan** realisasi secara YoY, kecuali **Belanja Fungsi Kesehatan** yang mengalami sedikit kenaikan dari Rp38,32 T (2019) menjadi Rp39,42 T (2020) atau naik sebesar **2,88%**.

Sedangkan **belanja yang mengalami penurunan terbesar** adalah **Perumahan dan Fasilitas Umum** sebesar 32,14% dan **Pariwisata dan Budaya** sebesar 29,97%.

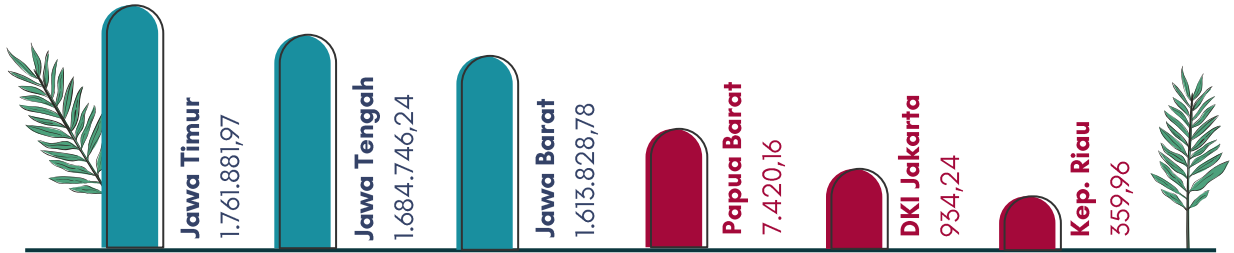


*Data realisasi 2020 sangat sementara yang dicetak 11 Februari 2021

KINERJA LAYANAN PERTANIAN

Kinerja pertanian pada tahun 2020 masih didominasi oleh daerah-daerah di Pulau Jawa, baik dari sisi luasan panen, produktivitas, dan total produksi. Namun demikian, angka produktivitas tertinggi terdapat di Prov. Bali.

Luas Panen Padi Tahun 2020 (Hektare)



Produktivitas Padi Tahun 2020 (satuan ku/ha)



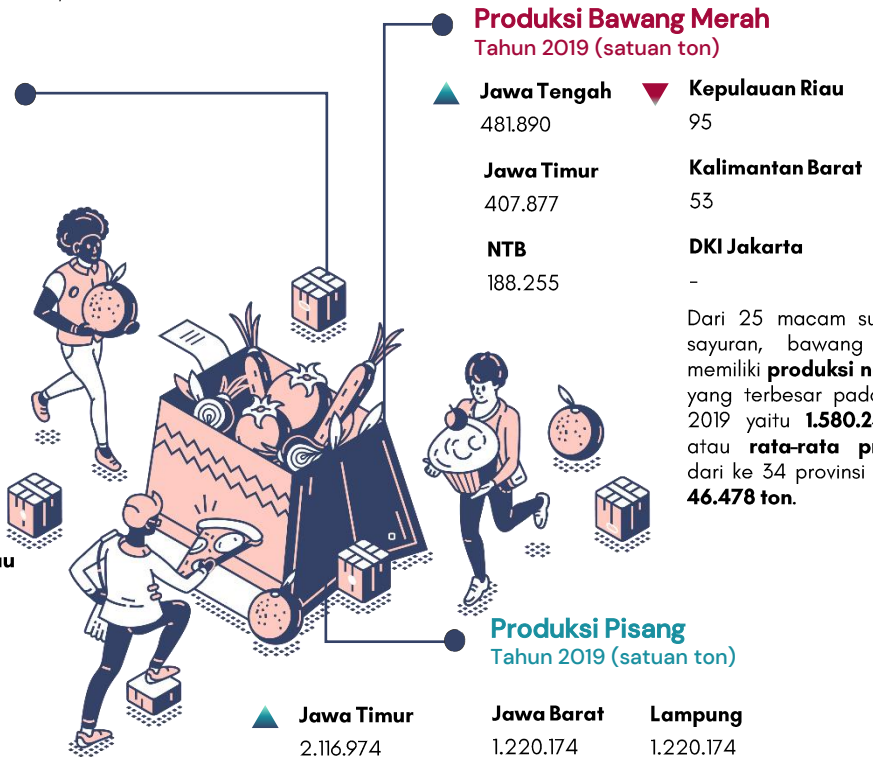
4

Ketahanan Pangan

Produksi Padi Tahun 2020 (satuan ton)

Total produksi padi secara nasional adalah **55.160.548,20 ton**.

▲ Jawa Timur	10.022.386,98
Jawa Tengah	9.596.910,98
Jawa Barat	9.219.886,00
▼ Papua Barat	25.897,09
DKI Jakarta	4.657,53
Kepulauan Riau	1.360,82



Dari 26 macam subsektor buah-buahan, pisang memiliki **produksi nasional** yang terbesar pada tahun 2019 yaitu **7.280.658 ton** atau **rata-rata produksi** dari ke 34 provinsi sebesar **214.137 ton**.

Dari 25 macam subsektor sayuran, bawang merah memiliki **produksi nasional** yang terbesar pada tahun 2019 yaitu **1.580.247 ton** atau **rata-rata produksi** dari ke 34 provinsi sebesar **46.478 ton**.

Nilai Tukar Petani (NTP) Data Januari 2021 (Sumber BPS)

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani dan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib) pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Sub Sektor Hortikultura, Sub Sektor Tanaman Perkebunan, Sub Sektor Peternakan, Sub Sektor Perikanan.

▶ NTP Petani (seluruh sub sektor)

TOP 3	
RIAU	132,9
BENGKULU	124,9
JAMBI	119,2

BOTTOM 3	
NUSA TENGGARA TIMUR	96,4
SULAWESI TENGAH	96,0
BALI	93,1

▶ NTP Petani Tanaman Pangan

TOP 3	
NUSA TENGGARA BARAT	111,54
KEPULAUAN RIAU	105,96
SULAWESI BARAT	104,06

BOTTOM 3	
SUMATERA SELATAN	93,36
RIAU	91,89
LAMPUNG	91,62

▶ NTP Tanaman Perkebunan

TOP 3	
RIAU	140,89
KALIMANTAN TIMUR	138,35
SUMATERA UTARA	136,99

BOTTOM 3	
KEPULAUAN RIAU	90,19
JAWA BARAT	89,54
BALI	79,58

▶ NTP Peternakan

TOP 3	
KEP. BANGKA BELITUNG	107,35
PAPUA	107
NUSA TENGGARA BARAT	106,89

BOTTOM 3	
BANTEN	94,14
DI YOGYAKARTA	94,05
JAWA TENGAH	93,21

Anggaran Ketahanan Pangan dalam APBD 2020

Anggaran ketahanan pangan merupakan anggaran belanja dalam APBD untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, yang merupakan bagian dari belanja fungsi ekonomi. Pada APBD 2020, jumlah anggaran untuk belanja ketahanan pangan sebesar Rp. 1,18 Triliun atau hanya sekitar 0,1% dari keseluruhan anggaran belanja APBD 2020 sebesar Rp1.300 Triliun.

10 daerah dengan proporsi belanja ketahanan pangan terbesar

No.	Daerah	Belanja Ketahanan Pangan	% Belanja Ketahanan Pangan
1	Kab. Labuhanbatu Selatan	18,048.55	1.7%
2	Kab. Kapuas Hulu	28,581.33	1.6%
3	Provinsi Kalimantan Barat	102,728.80	1.6%
4	Kota Bukit Tinggi	15,109.50	1.5%
5	Kab. Pidie Jaya	15,421.96	1.4%
6	Kab. Aceh Tamiang	15,666.25	1.1%
7	Provinsi Aceh	164,097.33	0.9%
8	Kota Manado	14,000.00	0.7%
9	Kab. Buol	6,194.42	0.6%
10	Kab. Karanganyar	13,836.97	0.6%

INOVASI DAERAH

Program Optimalisasi Lahan Rawa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki lahan Gambut 283 ribu ha atau terluas kedua di Sumatera Selatan. Perbaikan pengelolaan lahan gambut dan peningkatan kapasitas lahan gambut secara intensif terus dilakukan di Banyuwangi. Lahan Gambut yang subur dapat menjadi sumber makanan, air bersih, dan lainnya bagi masyarakat sekitar. Lahan Gambut bermanfaat juga untuk mencegah kekeringan, banjir dan pencampuran air asin untuk irigasi di area pertanian, serta untuk wilayah tropis menyimpan karbon yang paling banyak.

Kabupaten Banyuwangi dari rilis Kementan menjadi daerah penghasil beras terbesar nomor 4 nasional, dan satu-satunya daerah di luar pulau Jawa yang berhasil menyumbangkan produksi padi sebesar 905.846 ton dan produksi beras sebesar 519.684 ton dari luas panen 208.598 ha. Hal ini membawa Banyuwangi meraih penghargaan Indonesia 2020 untuk apresiasi ketahanan pangan swadaya dari Inews MNC Group dan Lencana Anugerah Karya Pangan dan Pertanian dari Kementan. Berbagai inovasi Banyuwangi pada program di sektor pertanian:

Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI)

yaitu Program Kegiatan Optimasi 67.836 Ha Lahan Rawa di 15 Kecamatan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dengan tetap memperhatikan fungsi pelestarian lingkungan, dengan sasaran peningkatan Indeks Pertanaman, dan produktivitas pertanaman padi di lahan rawa pasang surut/lebak. Kegiatan Optimasi Lahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Kegiatan pada masing masing Desa.

Program Petani Bangkit, 1 KK 1 Sapi

bertujuan untuk meningkatkan mutu genetik Sapi Lokal (upgrading) dengan introduksi bibit sapi unggul, dan peningkatan produksi daging dengan penyebaran sapi-sapi unggul untuk dipelihara dan dikembangkan. Sapi-sapi didistribusikan kepada kelompok tani di lima kecamatan yang dibiayai melalui APBD. Secara teknis indukan sapi dipelihara kelompok tani sampai punya anak, kemudian induknya akan dipindahkan ke kelompok tani lainnya

Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian

dilakukan melalui peningkatan penggunaan benih bermutu, penyediaan pupuk, penyediaan Alsintan, pengolahan tanah secara insentif, penyediaan pestisida dan pengelolaan air, dan perbaikan saluran-saluran air, pintu-pintu air dan tanggul.

Selain itu, juga melakukan ekstensifikasi lahan produktif, dengan pengembangan lahan sawah baru. Kemudian menyediakan sarana panen dan pasca panen yang modern seperti pengering gabah (vertical dryer) dan membangun RMU yang modern untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi. Selanjutnya, dilakukan peningkatan SDM Petugas Penyuluh Lapangan untuk melakukan pendampingan secara intens. Selain itu, melalui BUMD, Banyuwangi tengah mempersiapkan untuk memproduksi merek beras premium dan media pemasaran hasil petani Banyuwangi.

Program Serasi dan Program Petani Bangkit merupakan program yang menjadi solusi untuk turut berkontribusi meningkatkan perekonomian daerah dan menekan angka kemiskinan. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Kab Banyuwangi cukup baik berada di kisaran 5,05% sampai dengan 5,89% dalam lima tahun terakhir, demikian pula angka kemiskinan di Banyuwangi sebesar 11,17% jauh lebih rendah dari rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Sumsel sebesar 13,10%.

Sektor pertanian mampu menyerap 52,03% tenaga kerja di tahun 2019. Selain itu, keberhasilan Pemkab Banyuwangi dalam optimalisasi pengelolaan lahan rawa/gambut tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya daerah-daerah yang memiliki lahan gambut yang luas.

Lesson learned dari inovasi tersebut, yaitu: (i) perlunya Intensifikasi usaha tani dan diversifikasi produk, (ii) revitalisasi infrastruktur pertanian, (iii) adanya sinergi antara petani, pemerintah dan Badan Usaha, dan (iii) penguatan BUMD untuk mendorong ketahanan pangan.



EDITORIAL

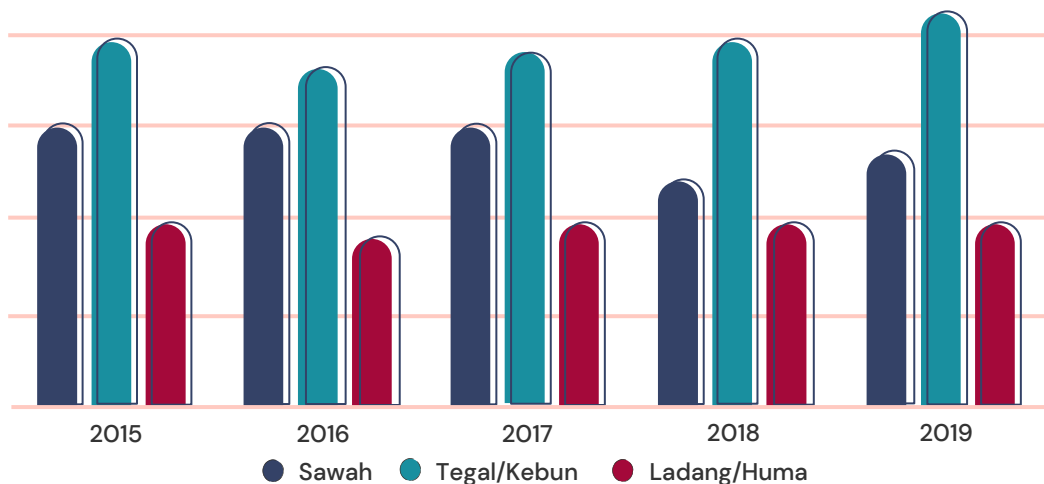
How to make agriculture sustainable is the challenge ◀

M. S. Swaminathan

Menurut Food and Agriculture Organisation (FAO), tahun 2019 Indonesia dengan produksi beras sebanyak 54,6 juta ton menjadi negara produsen beras terbesar ketiga di dunia setelah Cina (209.6 juta ton) dan India (177.65 juta ton). Di urutan ke-empat Bangladesh dengan produksi hanya selisih 0,02 juta ton di bawah Indonesia (54,58 juta ton). Dari data tersebut terlihat bahwa produksi beras Indonesia hanya sepertiga-nya India, sementara luas wilayah daratan per jumlah penduduk Indonesia mencapai 3 kali lipat India (Indonesia 7.05 m²/orang dan India 2.42 m²/orang). Sementara dibandingkan Bangladesh, luas wilayah daratan Indonesia tentunya jauh lebih besar (Bangladesh 0,92 m²/orang). Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas pertanian di Indonesia masih jauh dari optimal.

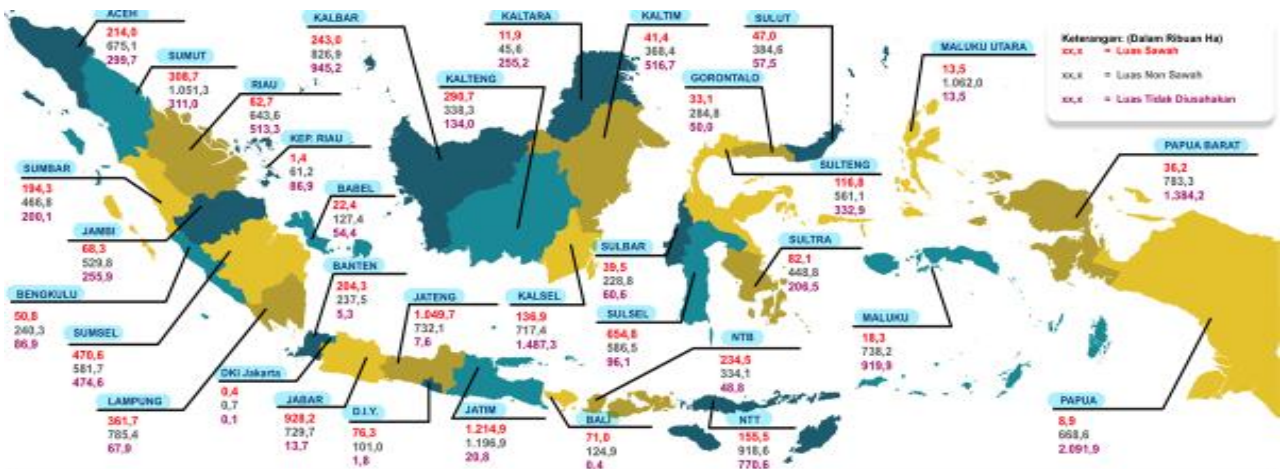
Selain tantangan tersebut, berdasarkan data Kementan, luas lahan pertanian Indonesia juga cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, luas lahan sawah mencapai 8,1 juta hektare dan tahun 2018 turun menjadi 7,1 juta Ha dan kemudian naik pada tahun 2019 menjadi 7,5 juta hektare. Menurut BPS, penurunan tersebut dikarenakan ada alih fungsi sawah yang cukup signifikan seperti Kawasan permukiman dan Kawasan industri, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan atau memberi insentif agar lahan pertanian tidak semakin menyusut.

Lahan berdasarkan Pemanfaatan

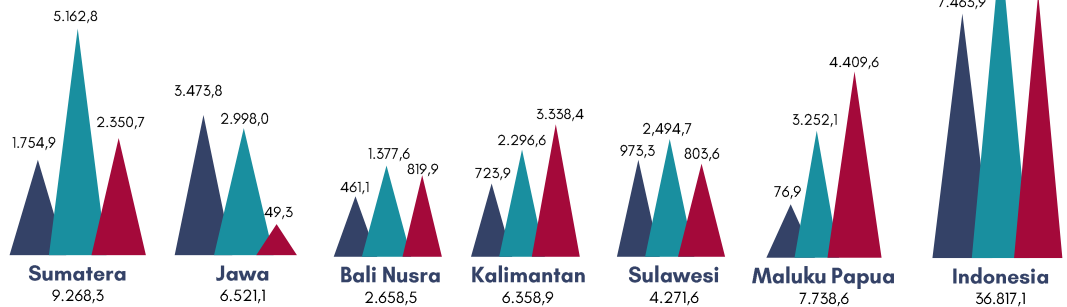


Secara nasional, luas lahan sawah Indonesia secara total adalah 7,5 juta hektare, dan hampir 50% justru berada di Pulau Jawa yang padat penduduk. Lahan yang tidak diusahakan mencapai 11,7 juta hektare dan 90% terletak di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Maluku-Papua. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Perpres 59 tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang antara lain mengatur tentang penetapan peta sawah dilindungi yang selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang. Perpres tersebut juga mengatur Pemberian insentif kepada Pemda untuk menetapkan peta lahan sawah yang dilindungi, dan pemberian insentif kepada masyarakat yang memiliki/mengelola lahan sawah yang ditetapkan dalam peta lahan sawah dilindungi. Di samping itu, insentif juga diberikan melalui kebijakan pengalokasian DAK Fisik. Pemda yang telah memiliki Peraturan Daerah LP2B menjadi kriteria lokasi prioritas dalam pengalokasian DAK Fisik.

Peta Luas Lahan Pertanian Indonesia Tahun 2019

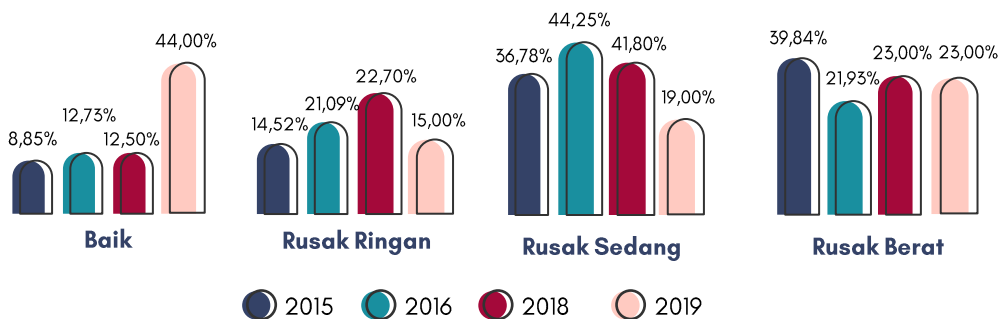


Luas Wilayah



Selain, lahan pertanian, irigasi mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia. Irigasi menjadi salah satu infrastruktur yang rentan dengan kerusakan yang besar. Hal ini dipengaruhi oleh faktor alam seperti air hujan, sendimen/pengendapan lumpur dan faktor kualitas bangunan. Sesuai data dari Kementerian PUPR bahwa pada tahun 2015–2018 terjadi penurunan kualitas jaringan irigasi (Mufti Wahyudi, 2020).

Perbandingan Rata-rata Kondisi Jaringan Tahun 2015 s.d. 2018



Sumber: RTI tahun 2015–2019, Ditjen SDA-Kementerian PUPR

Membangun fisik irigasi yang baru merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mengairi lahan pertanian, namun menganggarkan dana operasional dan pemeliharaan baik dalam APBN dan APBD juga diperlukan untuk menjaga kualitas fisik irigasi. Menurut catatan Bank Dunia, proporsi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan irigasi pada tahun 2017 sebesar 16% dari keseluruhan anggaran untuk irigasi. Ke depannya, besaran anggaran dana operasional dan pemeliharaan perlu diperbesar lagi mengingat jumlah kondisi jaringan irigasi yang rusak lebih tinggi daripada kondisi yang baik.

KABAR DAERAH

Prov. Banten

Pemprov Banten menyatakan kondisi ketahanan pangan di Banten selama masa pandemi dijamin aman dan terkendali. Pemprov Banten bahkan telah menyalurkan cadangan beras Pemprov Banten sebanyak 831.830 kg untuk 83.183 KK di 603 desa dan 83 kecamatan. Untuk keamanan pangan, Pemprov Banten telah menerbitkan 297 sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Berdasarkan data neraca ketersediaan dan kebutuhan beras, sampai dengan akhir tahun 2020 ketersediaan beras di Provinsi Banten surplus sebesar 105.314 ton. Provinsi Banten mampu memasok beras ke DKI Jakarta sebesar 15.518 ton per bulan selama bulan Juli-Desember 2020.

<https://www.republika.co.id/>

Prov. Lampung

Pemprov Lampung terus memantapkan kawasan Tanggamus, Pesisir Barat (Pesibar), dan Lampung Barat (Lambar) menjadi destinasi untuk pengembangan food estate. Potensi Lampung luar biasa sebagai lumbung pangan, lumbung ternak, dan lumbung pertanian terutama pengembangan pada wilayah dengan topografi berada pada ketinggian 800-1200 meter di atas permukaan laut. Provinsi Lampung memiliki potensi sektor pertanian yang luar biasa, salah satunya adalah sektor hortikultura dan perkebunan, antara lain bawang putih, merah, cabai, sayuran, pisang, alpukat, kopi, dan lada.

<https://m.lampost.co/>

Kota Bandung

Pemkot Bandung menggagas program Buruan SAE (Sehat, Alami, Ekonomis) untuk membangun ketahanan pangan keluarga. Meski lahan terbatas, warga bisa memanfaatkan lahan untuk keluarga sendiri. Dalam kondisi normal warga Kota Bandung membutuhkan kebutuhan pangan yakni 120 ton telur per hari dan daging ayam sebanyak 600 ribu ekor per hari, namun itu semua 90 persen diimpor dari daerah lain. Sehingga, hadirnya konsep Buruan SAE merupakan sebuah jawaban untuk menghadirkan kemandirian pangan di keluarga.

<https://ayobandung.com/>

Kota Yogyakarta

Di masa pandemi, warga Kota Yogyakarta menyulap sebuah lahan yang tadinya merupakan tempat pembuangan sampah menjadi sebuah tempat bercocok tanam. Selain tanaman, para warga juga melakukan budi daya ikan. Tercatat ada tiga ikan pangan yang dibudidayakan yakni ikan patin, ikan lele, dan ikan nila. Kemampuan para warga di Kampung Pugeran dalam bercocok tanam tak lepas dari peran pemerintah, baik dalam memberikan pelatihan maupun penyediaan fasilitas. Beberapa bantuan yang diberikan adalah kolam lele, rumah bibit, dll. Lahan bercocok tanam tersebut juga diupayakan menjadi tempat edukasi dan pariwisata.

<https://www.merdeka.com/>

Kab. Pinrang

Salah satu program Pemkab Pinrang dalam meningkatkan penghasilan dengan memanfaatkan pekarangan, maupun lahan kosong adalah Program Pangan Lestari (P2L). Melalui program ini, Pemkab Pinrang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan maupun lahan kosong yang tidak produktif, dengan menanam aneka tanaman. P2L dikembangkan dengan tujuan meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi keluarga. Melalui P2L bisa dihasilkan pangan beragam, bergizi seimbang dan aman, sekaligus untuk peningkatan pendapatan keluarga yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan.

<https://rakyatsulsel.co/>

Kab. Temanggung

Guna mewujudkan ketahanan pangan, Pemkab Temanggung, mengencarkan penanaman padi varietas inpari 32 karena secara kuantitas lebih banyak dari jenis lain dan cocok di kembangkan di wilayah ini. Setiap 1 hektare bisa menghasilkan panen sebanyak 10,5 ton, hampir dua kali lipat dibanding padi-padi yang biasa ditanam. Uji coba penanaman telah dilakukan oleh kelompok tani (gapoktan) Mapan di wilayah perbatasan Desa Campursalam dan Parakan Wetan. Pemkab Temanggung terus mengembangkan varietas inpari 32 ini, sehingga bisa menjadi bahan cadangan pangan yang cukup untuk seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung.

<https://www.gatra.com/>

KAJIAN PILIHAN

► Multidimensi Karakteristik Kemiskinan di Indonesia serta Permodelannya Terhadap Belanja Pemerintah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah selesai menghambat perekonomian Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di beberapa daerah memerlukan penanganan yang lebih optimal dan menjadi prioritas, baik dari pemerintah pusat maupun pemda. Orang miskin lebih banyak bermukim di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Wilayah Maluku dan Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 21,98%. Salah satu indikator belum efektifnya program pengentasan kemiskinan adalah terjadinya deviasi antara alokasi anggaran kemiskinan dengan capaian penurunan angka kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah program-program pengentasan kemiskinan tersebar di beberapa dinas belum berjalan secara optimal. Implementasi program tersebut belum lepas dari persoalan egosektoral, overlapping, dan bersifat parsial. Kajian ini menguji pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap penurunan kemiskinan. Kemudian, secara lebih detail kajian ini menjawab apakah belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur pada APBD akan menurunkan kemiskinan.



10

Ketahanan Pangan

Permodelan terhadap Belanja Wajib

Sampel penelitian yang digunakan adalah data panel APBD agregat se-provinsi di Indonesia selama periode 2011-2015, dengan metode kuantitatif berupa *Multiple Regression Ordinary Least Square*. Beberapa temuan yang diperoleh, yaitu;



Belanja pendidikan tidak signifikan mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan. Belum efektifnya belanja pendidikan, dapat disebabkan oleh pemenuhan belanja mandatori yang belum dilakukan di sebagian daerah. Selain itu, penggunaan dana belum terkoneksi langsung dengan upaya penguatan SDM. Saat ini, proporsi daerah yang telah memenuhi dan belum memenuhi belanja wajib bidang pendidikan yaitu 74 : 26.



Belanja kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Pengujian variabel belanja kesehatan menghasilkan nilai koefisien elastisitas sebesar -0.211 . Belanja kesehatan dapat meningkatkan produktivitas kerja penduduk yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan. Salah satu usaha pemerintah dalam menurunkan kemiskinan melalui belanja kesehatan adalah komitmen dalam mengatasi stunting yang berpengaruh buruk pada kesehatan dan produktivitas.

KAJIAN PILIHAN

Permodelan terhadap Belanja Wajib



Belanja infrastruktur tidak signifikan berpengaruh terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Hal ini disebabkan penyediaan infrastruktur masih dalam tahap pengembangan dan penerapan belanja wajib infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum diberlakukan mulai tahun anggaran 2017. Semestinya dalam jangka menengah dan panjang, belanja infrastruktur akan memberi efek positif terhadap investasi dan dorongan ekonomi. Hal ini akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan melalui keterbukaan lapangan kerja serta aktivitas ekonomi.



Secara bersama-sama belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Hal ini mengindikasikan hanya belanja kesehatan yang memegang peran penting dalam mengurangi kemiskinan melalui produktivitas kerja selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil empiris tersebut, perlu kiranya dilakukan peningkatan kualitas penganggaran dan penggunaan belanja pemerintah. Upaya untuk mendorong pemda memenuhi belanja wajib masih perlu ditingkatkan, baik melalui instrumen insentif maupun disinsentif fiskal dan non fiskal. Pemberian insentif sejauh ini telah dilakukan melalui pemberian Dana Insentif Daerah. Ke depan skim insentif fiskal dapat dilakukan, antara lain melalui skema pendanaan terintegrasi. Sedangkan disinsentif fiskal mulai dapat dijalankan melalui pengenaan sanksi, baik penundaan dan/atau penyaluran Dana Transfer Umum maupun sanksi terhadap hak-hak keuangan kepala daerah ataupun DPRD. Selain dari aspek pengalokasian dana, Pemerintah juga perlu mendorong Pemda untuk menggunakan dana APBD secara proper dan dikaitkan langsung dengan layanan dasar sehingga dapat memberikan *multiplier effect* bagi penurunan kemiskinan di daerah.

